

# MANAJEMEN PERPAJAKAN

## (*TAXATION MANAGEMENT*)

---

### Deskripsi Mata Ujian

Tujuan yang ingin dicapai dari mata ujian ini adalah agar peserta ujian memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. Memahami konsep manajemen perpajakan
2. Mengevaluasi aspek perpajakan dalam pemilihan pendanaan
3. Mengevaluasi aspek perpajakan dan *tax planning* atas laba usaha dan laba lainnya dalam:
  - a. Pajak Penghasilan Badan
  - b. Pajak Penghasilan Pot/Put
  - c. Pajak Pertambahan Nilai
4. Memahami perpajakan internasional, *transfer pricing*, dan *tax treaty* termasuk perpajakan di ASEAN

### Referensi

#### *Buku*

- Brian J. Arnold dan Michael J. McIntyre (2002). *International Tax Primer*. Kluwer Law International, 2<sup>nd</sup> edition. (AM)
- Erly Suandy (2011). *Perencanaan Pajak*. Penerbit Salemba Empat. (ES)
- Imam Santoso dan Ning Rahayu. (2013). *Corporate Tax Management*. Ortax (IN)
- John Hutagaol, Darussalam, Danny Septriadi (2006). *Kapita Selektta Perpajakan*. Salemba Empat. (JDD)
- Mohammad Zain (2007). *Manajemen Perpajakan*, Penerbit Salemba Empat. (MZ)
- Prianto Budi S. (2013). *Manajemen Pajak: Sebuah Pendekatan Komprehensif Empirik dan Praktis*, Pratama Indomitra Konsultan. (PBS)
- Rachmanto Surachmat (2012). *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda*, Penerbit Salemba Empat. (RS)
- Roy Rohtagi (2002) *Basic International Taxation*, Kluwer Law International. (RR)
- Thomas Sumarsan. (2013). *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*, PT. IDEKS. (TS)

#### *Website*

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

[www.ortax.org](http://www.ortax.org)

<b>MATERI DAN SUB MATERI</b>	<b>LEVEL</b>
1. <i>Overview</i> KUP	1
2. <i>Overview</i> PPh	1
3. <i>Overview</i> PPN	1
4. Pengertian dasar manajemen pajak. 4.1 Manajemen pajak dan <i>tax planning</i> . 4.2 <i>Tax evasion versus tax avoidance</i> . 4.3 <i>Anti tax avoidance measures</i> .	1
5. Pemilihan sumber pembiayaan 5.1 Dampak dari menahan laba (pendanaan internal). 5.2 Dampak dari pendanaan melalui modal ( <i>equity financing</i> ) dan distribusi laba ( <i>distributing dividend</i> ). 5.3 Dampak dari pendanaan melalui utang ( <i>debt financing</i> ) terutama oleh pemegang sahamnya. 5.4 <i>Factoring and leasing</i> . 5.5 <i>Hybrid financial instruments</i> .	2
6. <i>Tax planning</i> dan pengendalian atas penghasilan usaha dan penghasilan lainnya. 6.1 <i>Tax planning</i> pengelompokkan jenis penghasilan untuk menghitung angsuran masa PPh Pasal 25. 6.2 <i>Foreign exchange revenue</i> . 6.3 Rekonsiliasi peredaran usaha dan penghasilan lainnya dengan DPP PPN Keluaran dan DPP PPh yang dipotong/dipungut. 6.4 Berbagai pengujian untuk menguji kebenaran perhitungan peredaran usaha. 6.5 Pengendalian atas bea keluar (pajak ekspor) atas penjualan ekspor yang terutang bea keluar.	2
7. <i>Tax planning</i> dan pengendalian atas unsur-unsur beban pokok penjualan dan pengurang penghasilan bruto. 7.1 <i>Foreign exchange loss</i> . 7.2 <i>Capital expenditure versus revenue expenditure</i> . 7.3 Pemilihan metode persediaan. 7.4 Pemilihan metode penyusutan. 7.5 Menyiasati SE-46/PJ.4/1995 7.6 Cadangan kerugian piutang tak tertagih. 7.7 Biaya <i>entertainment</i> . 7.8 Persyaratan-persyaratan beban promosi sesuai peraturan perpajakan. 7.9 Berbagai pengujian untuk menguji kebenaran beban pokok penjualan. 7.10 Ekualisasi beban pokok penjualan dan beban operasional dengan DPP PPN Masukan.	2
8. <i>Tax planning</i> dan pengendalian atas PPh Pasal 21. 8.1 Kompensasi karyawan: tunai versus natura. 8.2 <i>Gross method, net method, dan gross-up method</i> . 8.3 Konsep <i>taxable</i> dan <i>deductible</i> terkait dengan unsur-unsur biaya karyawan. 8.4 Rekonsiliasi objek pph pasal 21 dengan unsur-unsur biaya karyawan: 8.4.1 Beda waktu. 8.4.2 Beda tetap.	2

<p>9. <i>Tax planning</i> dan pengendalian atas unsur-unsur objek <i>withholding tax</i> (selain PPh Ps. 21)</p> <p>9.1 Identifikasi atas objek-objek <i>withholding tax</i>.</p> <p>9.2 Rekonsiliasi SPT masing-masing <i>withholding tax</i> dengan biaya-biaya yang terkait dengan objek <i>withholding tax</i>.</p>	2
<p>10. <i>Tax planning</i> dan pengendalian atas Pajak Pertambahan Nilai</p> <p>10.1 Kapan seharusnya mendaftar sebagai PKP?</p> <p>10.2 Pengendalian atas faktur pajak keluaran maupun faktur pajak masukan agar memenuhi syarat formil dan materil.</p> <p>10.3 <i>Tax planning</i> pemilihan tempat pajak terutang.</p> <p>10.4 Strategi menghadapi temuan pemeriksa tentang konfirmasi PPN yang dinyatakan "tidak ada".</p> <p>10.5 Rekonsiliasi DPP PPN dengan peredaran usaha dalam SPT PPh Badan.</p>	2
<p>11. <i>Tax planning</i> dalam pemanfaatan <i>tax incentives</i></p> <p>11.1 Fasilitas PPh atas industri tertentu dan wilayah tertentu.</p> <p>11.2 Beragam fasilitas PPN dan bea masuk.</p> <p>11.3 Strategi memanfaatkan seluruh fasilitas perpajakan yang ada.</p>	3
<p>12. <i>Konsep</i> dasar pajak internasional</p> <p>12.1 Konsep dasar perpajakan internasional.</p> <p>12.2 Konsep <i>juridical versus economic double taxation</i>.</p> <p>12.3 Konsep <i>anti-tax avoidance</i>.</p> <p>12.4 Pengertian dan tujuan penghindaran pajak berganda (P3B).</p> <p>12.5 <i>Transfer pricing</i>.</p>	2